

**PENGARUH INFRASTRUKTUR DAN PENDIDIKAN TERHADAP  
KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

I Ketut Adi Winanda Sila Putra <sup>1</sup>

I Gusti Wayan Murjana Yasa <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,  
Indonesia

**ABSTRAK**

Kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan indikator komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia ini sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh infrastruktur dan pendidikan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penurunan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung infrastruktur dan pendidikan terhadap kesejahteraan Masyarakat melalui Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

**Kata kunci :** *ipm, kemiskinan, infrastruktur, pendidikan*

**ABSTRACT**

*Community welfare is measured using a composite indicator called the Human Development Index (HDI). This level of human development largely determines the ability of the population to absorb and manage the sources of economic growth. The purpose of this study was to analyze the effect of infrastructure and education on poverty and community welfare in the Regency / City of Bali Province. The data used are secondary data with path analysis techniques. Based on the analysis, it was found that infrastructure and education had a significant negative effect on poverty in the regencies / cities of Bali Province. Infrastructure has no effect on Community Welfare, while education has a significant positive effect on Community Welfare in the Regency / City of Bali Province. Poverty reduction has no effect on Community Welfare in the Regency / City of Bali Province. There is no indirect effect of infrastructure and education on community welfare through poverty in the regencies / cities of Bali province.*

*Keywords: IPM, poverty, infrastructure, education*

## **PENDAHULUAN**

*Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan program yang digunakan dalam menyongsong perbaikan pembangunan ekonomi yang memiliki lima pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan (Wahyuningsih, 2017). SDG's lahir sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi setelah pemberlakuan *Millennium Development Goals (MDG's)* berakhir pada tahun 2015. Pada konsep pengembangan SDG's terdapat tiga pilar indikator, yaitu: pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), kedua merupakan indikator yang melekat pada lingkungan kecil (*Social Economic Development*), ketiga merupakan indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*).

SDG's memiliki 17 tujuan global, antara lain: tanpa kemiskinan; kesehatan yang baik dan kesejahteraan untuk segala usia; memastikan pendidikan yang bermutu dan merata serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang; mengurangi kesenjangan atau ketidaksetaraan. Menurut Pisano (2015), terdapat tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama pada program ini yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dunia telah sepakat untuk memfokuskan pada tiga ruang lingkup tersebut salah satunya mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang baik (Ishartono dan Raharjo, 2016).

Semua sasaran pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDG's memiliki hubungan yang saling terkait, artinya keberhasilan yang satu akan mempengaruhi yang lainnya. Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang memiliki kesinambungan antara dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

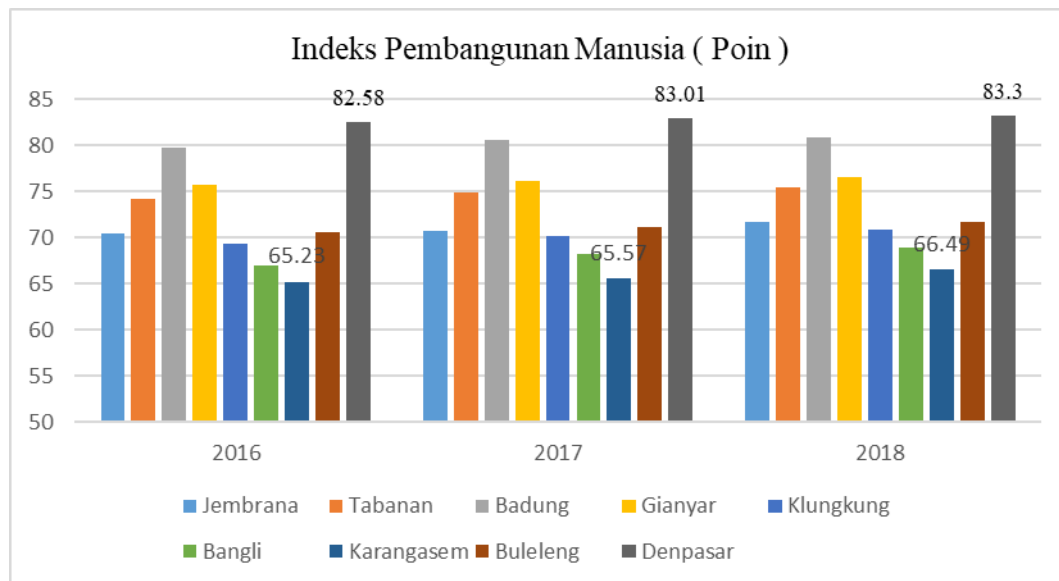
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang begitu populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menjadi tujuan wisata utama dunia menyebabkan Provinsi Bali memiliki penduduk yang padat. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah dengan sangat keras dalam menentukan segala kebijakan terutama yang menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat yang digunakan sebagai indikator pembangunan berkelanjutan. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indikator komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga aspek penting, yakni pendidikan, kesehatan, dan juga pengeluaran perkapita. Semakin tinggi tingkat Pendidikan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta memperoleh pendapatan sehingga masyarakat mampu untuk mengakses kesehatan yang layak. Kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan produktivitas yang

rendah, sehingga produktivitas yang rendah ini akan menyebabkan pendapatan masyarakat juga rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah tentunya akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga masyarakat tidak akan mampu untuk melakukan konsumsi sebagaimana mestinya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan (Putra dan Ulupui, 2015).

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan adanya pembangunan manusia. Menurut Hou *et al.* (2015), pembangunan manusia dikatakan sebagai lingkungan dimana orang dapat mengembangkan potensi mereka dan memimpin secara produktif. Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, antara lain pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia (BPS, 2016: 1).

*United Nations Development Programme* (UNDP) menekankan agar pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan

manusia baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat bagi pembangunan. UNDP menetapkan sebuah indeks sebagai ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Rustariyuni, 2014). Indeks tersebut mencerminkan kualitas modal manusia yang diukur dari indikator tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat (Ezkirianto dan Findi, 2013). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Hariawan dan Swaningrum, 2015). Jadi tujuan akhir dari pembangunan manusia ini adalah Kesejahteraan Masyarakat. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu (BPS, 2017): (1)  $IPM < 60$ : IPM rendah; (2)  $60 \leq IPM < 70$ : IPM sedang; (3)  $70 \leq IPM < 80$ : IPM tinggi; (4)  $IPM \geq 80$ : IPM sangat tinggi.



Sumber: *www.bali.bps.go.id*, 2020

**Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Poin)**

Pada tahun 2017 Provinsi Bali menyandang posisi ke lima nasional dengan nilai indeks pembangunan manusia dalam kategori tinggi sebesar 74,3 poin. Nilai indeks pembangunan manusia Provinsi Bali masih dibawah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kepulauan Riau. Namun Terlihat pada Gambar 1.1 bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali masih mengalami masalah ketidakmerataan, bahkan di tahun 2017 terdapat 4 Kabupaten di Provinsi Bali yang indeks pembangunannya dibawah rata-rata nasional 70,81 yakni kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Rata-rata indeks pembangunan manusia terendah disandang oleh Kabupaten Karangasem sebesar 64,65 dan yang tertinggi diraih oleh Kota

Denpasar sebesar 82,16. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Brata dalam Dewi dan Sutrisna, 2014). Tingkat Ketimpangan antar daerah yang diukur melalui IPM dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial yang merupakan suatu proses pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau lainnya (Antonescu, 2010). Disparitas tersebut dapat terlihat pada Kawasan SARBAGITA dan Kawasan Non-SARBAGITA. Kawasan SARBAGITA memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali. IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar sebesar 83,01 pada tahun 2017. Sebagai ibu kota provinsi sudah sewajarnya bahwa Kota Denpasar memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi karena segala pusat kesehatan, pendidikan dan ekonomi berada di Kota Denpasar. Sebaliknya, Kawasan Non-SABAGITA masih memiliki IPM yang berada di bawah angka IPM Provinsi. IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Karangasem sebesar 65,57 pada tahun 2017. Rendahnya angka IPM di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh rendahnya daya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator pembentuk IPM. Hingga saat ini, disparitas antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat (Irawan, 2015).

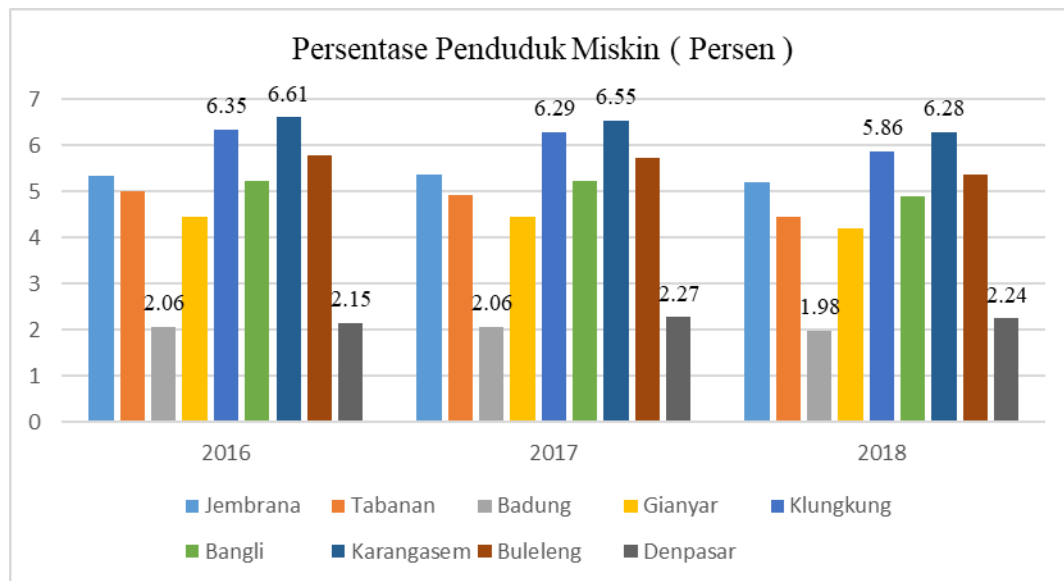
Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan IPM pada suatu daerah. Berikut merupakan data anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari IPM.

Menurut Budhi (2013), fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sampai saat ini, namun nyatanya masih banyak penduduk dunia yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Menurut Margareni dkk. (2016), pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya. Masalah kemiskinan ini terutama dihadapi oleh negara berkembang (Vincent, 2009). Indonesia yang termasuk dari salah satu negara berkembang ini banyak rakyatnya hidup tidak jauh di atas garis kemiskinan (Yusuf dan Sumner, 2015). Menurut Suryahadi dkk. (2012), kemiskinan di Indonesia sebagian besar terjadi di pedesaan. Data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018, sekitar 25.674.580 penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan. Orang miskin terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung pangkal disebut lingkaran setan (*vicious circle*) (Seran, 2017).

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.



Sebagai daerah tujuan wisata Bali memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dimana perekonomian Bali pada triwulan 1 2017 tumbuh sebesar 5,75 persen lebih baik dibandingkan pertumbuhan secara nasional pada periode yang sama yaitu sebesar 5,01 persen, namun dibalik meningkatnya pertumbuhan ekonomi Bali saat ini masih saja terdapat masalah sosial seperti kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan seperti JKBM, bedah rumah, Simantri, Gerbang Sadu masih belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, maka dari itu permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra (Dariwardani, 2014). Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya dipandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Wiradyatmika dan Suidiana, 2013). Gambar 2 menunjukkan persentase penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Bali.



Sumber: *www.bali.bps.go.id, 2020*

**Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (persen)**

Meskipun rata-rata penduduk miskin di Provinsi Bali yang berkisar antara 4,25 persen - 4,76 persen selama periode 2014 - 2018 lebih rendah dari rata-rata penduduk miskin Nasional yakni sebesar 7,26 persen - 8,52 persen pada periode yang sama, namun dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, padahal jumlah penduduk miskin seharusnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami peningkatan di tahun 2013 ke 2014 dari 4,49 persen menjadi 4,76 persen, selanjutnya di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,74 persen. Menurut BPS Provinsi Bali penurunan ini disebabkan pada tahun 2015 tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Bali semakin menyempit yang ditandai dengan penurunan angka Gini Rasio dari 0,4418 pada tahun 2014

menjadi 0,3768 pada tahun 2015. Di tahun 2016 mengalami penurunan lagi sebesar 0,49 persen menjadi 4,25 persen serta ditahun 2017 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan yakni tetap di angka 4,25 persen. Ini berarti tidak ada perubahan yang signifikan terjadi sejak ditetapkannya *SDG's* pada tahun 2015 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali yang dapat dilihat pada tahun 2017 dengan tidak adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya.

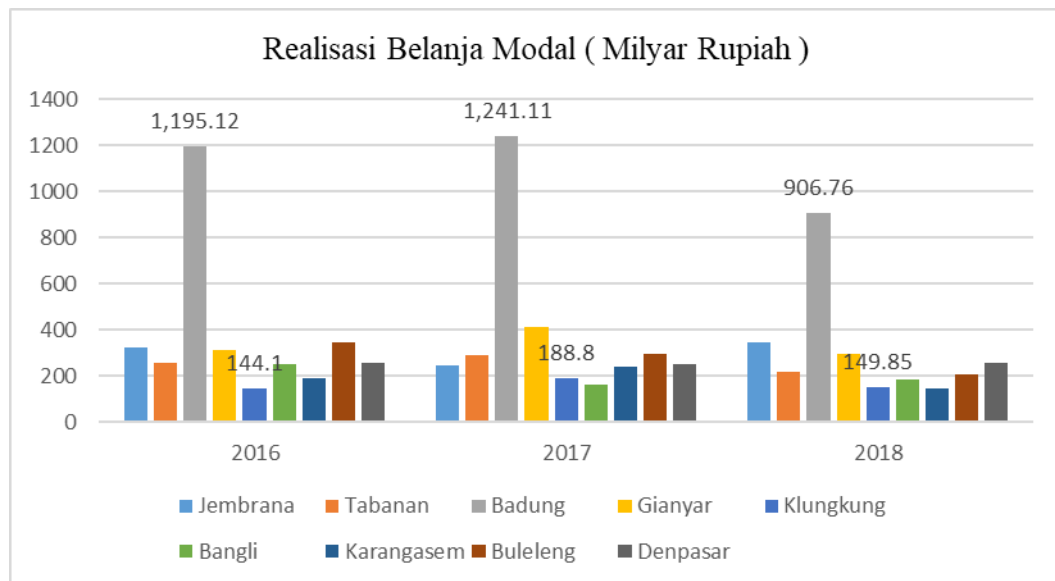
Masalah pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu perhatian utama pembangunan manusia (Williamson, 2001). Menurut Madan (2012), Tingkat kemiskinan identik dengan kualitas hidup yang buruk, hidup dalam kekurangan, kekurangan gizi, buta huruf dan rendahnya tingkat perkembangan manusia. Program pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan kecuali mengetahui siapa sebenarnya orang miskin itu. Keberadaan penduduk miskin dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara (Mahaeni dkk., 2014). Sumber daya manusia yang paling tua salah satunya adalah modal manusia dalam bentuk tenaga kerja. Modal manusia sudah dimiliki sejak pemiliknya dilahirkan ke dunia. Modal ini baru bisa dimanfaatkan setelah pemiliknya beranjak dewasa, namun tergantung juga pada negara, masyarakat, lingkungan, keluarga, dan peraturan yang berbeda-beda antar negara (Bendesa, 2014).

Peningkatan indeks pembangunan manusia yang mampu berdampak pada penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari meningkatnya

pengeluaran pemerintah di sektor publik. Dengan meningkatnya pengeluaran di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk (Widodo dkk., 2011). Salah satu pengeluaran pemerintah di sektor publik yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia serta kemiskinan adalah pengeluaran infrastruktur pemerintah.

Menurut Suparno (2014) Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk dari belanja modal, yang diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat (BPS, 2018:26). Gambar 3 menyajikan data Realisasi Belanja Modal Provinsi Bali periode 2014-2018.

Realisasi Belanja Modal Provinsi Bali pada tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan, hanya saja di tahun 2018 terjadi sedikit penurunan di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Namun belanja modal tahun 2014 tetap lebih besar dari belanja modal di tahun 2015-2018. Hal ini sejalan dengan salah satu Nawacita Jokowi. Dimana satu bidang yang pemerintah menunjukkan niat dan kemajuannya adalah infrastruktur (Ray dan Ing, 2016).



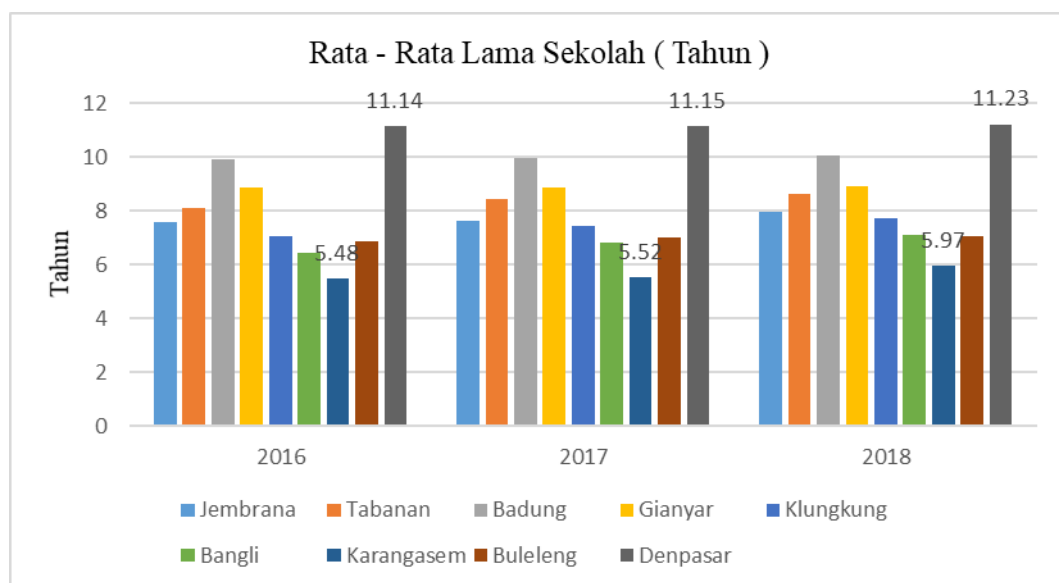
Sumber: *www.bali.bps.go.id*, 2020

**Gambar 3 Realisasi Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)**

Selain pengeluaran pemerintah di sektor publik, dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia pendidikan juga turut andil di dalamnya. Investasi dalam pendidikan akan lebih berarti bagi orang miskin daripada yang tidak miskin, karena untuk penduduk miskin aset utama adalah energi. Keberadaan fasilitas pendidikan yang murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas (Asmita dkk., 2017) dengan meningkatnya produktivitas maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Menurut Rahayu dan Trisnawati (2014), Tingkat pendidikan dapat berperan penting dalam menentukan pekerjaan, semakin tingginya pendidikan maka akan semakin layak ia mendapatkan pekerjaan. Hal ini

yang mendasari kebanyakan orang tua yakin bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi proses perbaikan tingkat pendapatan. Makin baik kualitas pendidikan, maka makin besar pula harapan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang (Kurniawan, 2016). Gambar 4 menyajikan data rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2014-2018.



Sumber: *www.bali.bps.go.id, 2020*

**Gambar 4 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Tahun)**

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali sebesar 8,65 tahun, lebih tinggi 0,48 tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah nasional yakni 8,17 tahun. Ini

menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia  $\geq 15$  tahun di Provinsi Bali telah menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertamanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur, Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis peran Kemiskinan dalam memediasi pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

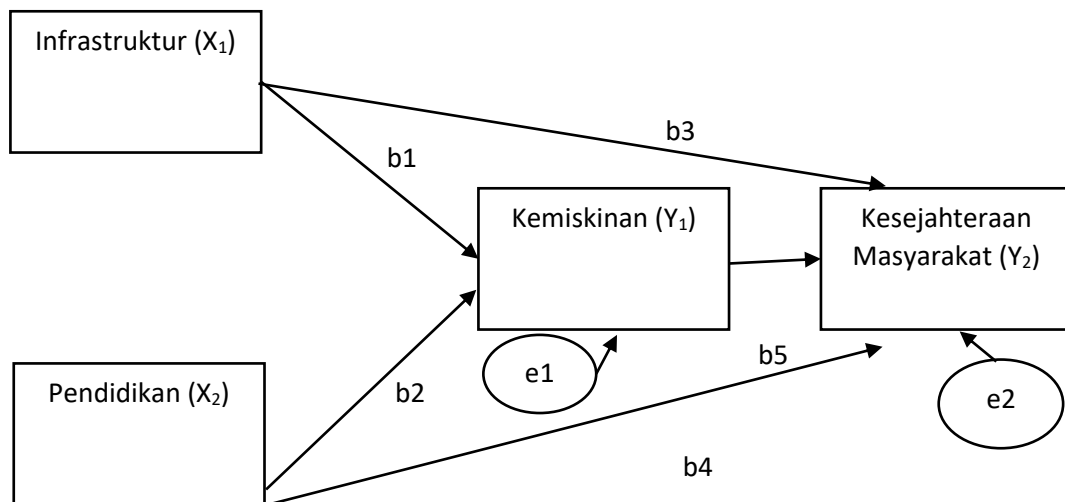
#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur dan Pendidikan terhadap kemiskinan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi non partisipan. Adapun jenis metode tersebut dijelaskan sebagai berikut.

##### **1) Observasi Non Partisipan**

Observasi non partisipan adalah pengumpulan data dengan observasi/pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2002:204). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS

Provinsi Bali. Data yang dikumpulkan tersebut adalah realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali, rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Bali, presentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Hubungan variabel tersebut di jelaskan melalui kerangka konseptual yang ada.



**Gambar 5 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur dan Pendidikan terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Persamaan yang dapat dibuat berdasarkan gambar tersebut yaitu :

$$Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (2)$$

$$Y_2 = b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (3)$$

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:



$$e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (4)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - e_1^2 e_2^2 \dots \dots \dots (5)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap  $R_m^2$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Jalur (*Path Analysis*)

**Tabel 1 Hasil Regresi Pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.187	.424		28.743	.000
	Infrastruktur	-.001	.000	-.201	-3.679	.001
	Pendidikan	-.865	.055	-.856	-15.687	.000

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Lampiran 3

Pengujian persamaan 1 dilakukan untuk melihat pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan terhadap Kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan program SPSS *Versi 23.0* maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 4.6. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Infrastruktur dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,201 dengan sig. 0,001 < 0,05 menunjukkan bahwa Infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel kemiskinan dimana nilai signifikansi (0,001)

lebih kecil dr alpha 0,05. Dengan nilai B1 -0,201, sedangkan Pendidikan dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,856 dengan sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel kemiskinan dimana nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dr alpha 0,05. Dengan nilai B2 -0,856. Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh Infrastruktur, Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS *Versi 23.0* maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2 Hasil Regresi Pengaruh Infrastruktur, Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49.932	3.325		15.016	.000
	Infrastruktur	.001	.001	.028	.870	.389
	Pendidikan	3.024	.249	.893	12.145	.000
	Kemiskinan	-.296	.266	-.088	-1.110	.273

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Lampiran 4

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan Infrastruktur dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,028 dengan sig. yaitu 0,389 > 0,05 menunjukkan bahwa Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat dimana nilai signifikansi (0,389) lebih besar dr alpha 0,05. Dengan nilai B3 0,028. Pendidikan

dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,839 dengan sig. yaitu  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat dimana nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dr alpha 0,05. Dengan nilai B4 0,893, sedangkan Kemiskinan dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,088 dengan sig. yaitu  $0,273 > 0,05$  menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat dimana nilai signifikansi (0,273) lebih besar dr alpha 0,05. Dengan nilai B5 -0,088. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Utama, 2012). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural berikut:

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = -0,201X_1 - 0,856X_2 + e_1$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = 0,028X_1 - 0,893X_2 - 0,088Y_1 + e_2$$

#### **Nilai Kekeliruan Taksiran Standar**

Mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah *variance* variabel IPM yang tidak dijelaskan oleh Infrastruktur dan Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2}$$
$$e_1 = \sqrt{1 - 0,889} = 0,333$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan *variance* variabel Kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh variabel Infrastruktur, Pendidikan, dan IPM, maka dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2}$$
$$e_2 = \sqrt{1 - 0,971} = 0,170$$

### **Pemeriksaan Validitas Model**

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut :

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2$$
$$= 1 - (0,333)^2 - (0,170)^2$$
$$= 0,9968$$

Keterangan :

$R^2_m$  : Koefisien determinasi total

$e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total sebesar 0,9968 mempunyai arti bahwa sebesar 99,68 persen informasi yang terkandung dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk, sisanya yaitu 0,32 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang terbentuk.

### **Pengaruh Langsung Variabel**

#### **Pengaruh langsung Infrastruktur terhadap kemiskinan**

Nilai standardized coefficient beta sebesar  $-0,201$  dan nilai probabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Infrastruktur (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y1). Hubungan negatif dan signifikan yang didapat dalam hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Priyarsono (2012) yang menyatakan bahwa, Jalan berperan penting dalam merangsang maupun mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kondisi jalan yang baik memberikan keunggulan untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produksi, mengembangkan industri, mendistribusikan populasi, serta meningkatkan pendapatan (Purnomo, 2009). Pembangunan prasarana jalan turut berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah yang pada akhirnya akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan wilayah sehingga kondisi jalan yang baik dan proporsional dengan luas wilayah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Infrastruktur yang tersedia dengan baik di daerah merupakan suatu prakondisi yang dibutuhkan untuk dapat menurunkan kemiskinan di daerah, tetapi ketersediaan infrastruktur bukanlah satu-satunya faktor yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pemerintah daerah perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kemiskinan di daerahnya agar kebijakan penanggulangan yang diambil dapat efektif dan tepat sasaran sesuai karakteristik dari masing - masing daerah.

### **Pengaruh langsung Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,856 dan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pendidikan ( $X_2$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan ( $Y_1$ ). Hubungan negatif dan signifikan Pendidikan terhadap Kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awan dkk. (2011) tingkat pendidikan dapat mengurangi kemungkinan penduduk menjadi miskin, dengan kata lain pendidikan berdampak negatif terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Njong (2010) yang meneliti pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan di Kamerun. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa memang tingkat pendidikan memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2013) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan orang tua dalam pendidikan anaknya.

### **Pengaruh langsung Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,028 dan nilai probabilitas sebesar  $0,389 > 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Infrastruktur ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ). Hubungan tidak berpengaruh signifikan infrastruktur terhadap kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dari Susanti, E. (2020) yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian

dapat diketahui variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Penelitian memberikan makna bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak mampu mempengaruhi IPM Provinsi Kalimantan Timur. Problem pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur belum mendapatkan perhatian pemerintah secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan IPM, harus dilakukan dengan membangun fasilitas yang berkualitas dan merata di bidang infrastruktur yang menunjang perekonomian seperti pasar, akses distribusi barang dan jasa berupa jalan, jembatan, pelabuhan bongkar muat barang, bandara dan lain-lain. Program yang salah sasaran dan belum meratanya pembangunan di sektor infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur menghambat pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya terjadinya kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik, sehingga pemerintah memiliki peranan penting dan harus campur tangan melalui kebijakan fiskal. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi utama dari kebijakan fiskal, diantaranya: stabilitas keuangan, penyediaan barang publik dan redistribusi pendapatan (Waluyo, 2010).

### **Pengaruh langsung Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,893 dan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pendidikan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ). Hubungan positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dari Kolle dalam Bintarto (1989: 44) yang menyatakan bahwa dalam mengukur kesejahteraan seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kesejahteraan salah satunya adalah melalui pendidikan. Dalam Kolle, pendidikan ini masuk ke dalam segi mental dan spiritual dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Fenomena yang terjadi dalam jenjang pendidikan yang ditempuh oleh mayoritas penduduk kelurahan Kesatrian adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Namun, karena memang sebagian besar berprofesi sebagai tentara dan mobilisasi yang sangat cepat karena berkaitan dengan tugas negara yang mereka emban maka tidak mengherankan meskipun lulusan SMA memiliki gaji setara dengan S1 bahkan lebih. Setelah lulus SMA, mereka diwajibkan bagi yang masuk militer untuk pendidikan tentara dengan jangka waktu tertentu, hal ini lah yang kemudian menjadikan lulusan tingkat SMA lebih banyak.

### **Pengaruh Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,382 dan nilai probabilitas sebesar  $0,218 > 0,05$  ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya



Kemiskinan ( $Y_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginting, Charisma Kuriata S, dkk (2008) yang berjudul “Pembangunan Manusia di Indonesia”. Selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2007) yang berjudul “Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan” dimana hasil analisis deskriptifnya menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Paradigma pembangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian - penelitian tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah.

### **Pengaruh Tidak Langsung**

**Pengaruh tidak langsung Infrastruktur terhadap kesejahteraan Masyarakat melalui Kemiskinan**

Oleh karena nilai Z (1,13) lebih kecil dr 1,96, maka variabel infrastruktur tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui variabel kemiskinan, dengan kata lain variabel kemiskinan bukan merupakan variabel yang memediasi pengaruh infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

**Pengaruh tidak langsung Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kemiskinan**

Oleh karena nilai Z (1,11) lebih kecil dr 1,96, maka variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui variabel kemiskinan, dengan kata lain variabel kemiskinan bukan merupakan variabel yang memediasi pengaruh pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

**SIMPULAN**

- 1) Infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 2) Infrastruktur tidak berpengaruh (signifikan) terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Pendidikan berpengaruh positif (signifikan) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
- 3) Penurunan Kemiskinan tidak berpengaruh (signifikan) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 4) Tidak terdapat pengaruh tidak langsung infrastruktur dan pendidikan terhadap kesejahteraan Masyarakat melalui Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## **SARAN**

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Bali hendaknya melakukan kebijakan dalam membuat pemerataan pengeluaran infrastruktur di Provinsi Bali, kenyataan yang ada pengeluaran infrastruktur di Provinsi Bali hanya berpusat pada Kabupaten Badung saja, padahal minat pariwisata Kabupaten/Kota lainnya mulai dilirik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara dan banyak daerah lain yang masih minim fasilitas umum serta pengalokasiannya harus diawasi sehingga tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur penunjang komponen kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Pemerintah daerah Provinsi Bali hendaknya meningkatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini dikarenakan meskipun data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus meningkat dari tahun ke tahun namun belum mencapai target yang dicanangkan pemerintah yaitu 12 tahun atau setara dengan SMA, selain itu program-program bantuan dana pendidikan dari pemerintah harus tepat sasaran agar masyarakat miskin yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan dapat menikmati pendidikan tanpa harus memikirkan biaya pendidikan yang mahal dan nantinya dapat menambah pengaruh

dalam pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Ketimpangan yang terjadi antar daerah terkait dengan pembangunan manusia memang harus diatasi oleh Pemerintah dan didukung oleh masyarakat. Kebijakan terkait perbaikan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas baik sarana dan pasarana pendidikan di daerah – daerah terpencil sehingga seluruh masyarakat mampu mengenyam pendidikan , sumbangan pendidikan ke masyarakat kurang mampu , atau pelatihan guru – guru sebagai tenaga pengajar yang dapat dikirim ke daerah – daerah terpencil.

#### **REFERENSI**

- Asmita, Fitriawaty dan Dede Ruslan. 2017. Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province. *IOSR-JBR* 19(10). Hal: 27-36.
- Antonescu, Daniela. (2010). The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration. *Scientific Researcher*, 2(40). Halaman:161-183.
- Awan, Masood Sarwar., Nouman Malik., Haroon Sarwar dan Muhammad Waqas. 2011. Impact of Education on Poverty Reduction. *International Journal of Academic Research*, 3(1). Hal: 659-664.
- Bassam A. AlBassam. (2013). The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*. 2(4). Hal: 1-18.
- Bendes, I K. G. 2014. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter. *Jurnal Piramida*, 10(1). Hal: 1-7.
- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1). Hal: 1-6.
- Hariawan, Peggy dan Ayu Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia pada 5 wilayah hasil pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1). Hal 72-82.
- Hou, Jack., Patrick Paul Walsh, and Jing Zhang. 2014. The Dynamics of Human Development Index. *The Social Science Journal*. Hal: 17.

- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. (2016). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6 (2). Halaman: 154-272.
- Kurniawan, Jarot. 2016. Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1). Hal: 59-67.
- Mahesha, Dr. D., Shivalingappa, Dr. B.N. (2011). Regional Disparities of Human Resource Development in South India. *E-International Scientific Research Journal*, Vol. 3(4). Hal. 299-306.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama., I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa. 2016. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 12(1). Hal: 101-110.
- Njong, Aloysius Mom. 2010. The Effects of Educational attainment on poverty reduction in Cameroon. *Journal of Education Administration and Policy Studies*, 2(1). Hal: 001-008.
- Oghuvbu, Enamiroro Patrick. 2007. Education, Poverty and Development in Nigeria: The Way forward in the 21st Century. *J.Soc. Sci*, 14(1). Hal: 19-24
- Putra, Putu Gde Mahendra dan I gusti Ketut Agung Ulupui. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3: 863-877.
- Rahayu, Shabrina Umi dan Ni Made Tisnawati. 2014. Analisis Pendapatan Keluarga Wanita Single Parent (Studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2). Hal: 83-89.
- Ray, David dan Lili Yan Ing. 2016. Addressing Indonesia's Infrastructure Deficit. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(1). Hal: 1-25.
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*, 10(1). Hal: 45-55.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1). Hal: 59-71.
- Sharp et al. (Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes , P.W. 2000, *Economics of Social Issues* 14th edition, New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Sofilda, Eleonora., Muhammad Zilal Hamzah, Arip Syaman Sholeh. 2013. Human Development and Poverty In Papua Province. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 6(6). Hal: 52-62.
- Suryahadi, Asep., Gracia Hadiwidjaja dan Sudarno Sumarto. 2012. Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after the asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2). Hal: 209-227.

- Vincent, Brian. 2009. The Concept 'Poverty' towards Understanding in the context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty' : with some Comparative Evidance on Britain. *Journal of sustainable Development*, 2(2). Hal: 3-13.
- Williamson, Deanna L. 2001. The Role of The Health Sector in Addressing Poverty. *Canadian Journal of Public Health*, 92(3). Hal: 178-183.
- Yusuf, Arief Anshory dan Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 51(3). Hal: 323-348.